



PENGANTAR
**ILMU
POLITIK**



LEO AGUSTINO

Leo Agustino

— PENGANTAR ILMU POLITIK —

Intrans Publishing
2020

PENGANTAR ILMU POLITIK

Penulis:

Leo Agustino

Cover: Rahardian Tegar Kusuma

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, Juni 2020

ISBN: 978-602-6293-95-4

Diterbitkan bersama oleh:

Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Leo Agustino

Pengantar Ilmu Politik/Penyusun, Leo Agustino - Cet. 1 - Malang: Intrans Publishing, 2020

xii + 294 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

1. Ilmu Politik

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

320.01

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis -- v

Pengantar Penerbit -- xi

Bab 1. Pendahuluan -- 1

Memahami Konsep Dasar Politik -- 6

Alasan Mempelajari Ilmu Politik -- 13

Pendekatan dalam Ilmu Politik -- 15

Bab 2. Kekuasaan -- 19

Mendefinisikan Kekuasaan -- 21

Sumber Kekuasaan -- 30

Distribusi dan Peralihan Kekuasaan -- 34

Sirkulasi Elit -- 38

Legitimasi -- 41

Bab 3. Negara -- 50

Asal Mula Negara -- 53

Elemen dan Unsur Negara -- 61

Kekuasaan Negara dan Kedaulatan Rakyat -- 66

Perilaku Negara di Negara-negara Berkembang -- 76

Bab 4. Masyarakat Sipil: Partisipasi Politik, Perilaku Pemilih, dan Gerakan Sosial -- 84

Memahami Masyarakat Sipil -- 85

Partisipasi Politik -- 93

Perilaku Pemilih: Partisipasi dalam Pemilihan Umum -- 99

Hubungan Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih -- 104

Politik Identitas dalam Masyarakat Sipil -- 108

Masyarakat Sipil dan Gerakan Sosial -- 114

Pola Relasi Masyarakat Sipil dan Negara -- 117

Bab 5. Sistem Perwakilan: Kelompok dan Partai Politik -- 121

Teori Perwakilan -- 121

Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan -- 124

Partai Politik -- 130

Bab 6. Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilu -- 145

Sistem Kepartaian -- 147

Sistem Pemilihan Umum -- 155

Bab 7. Keputusan Politik dan Kebijakan Publik -- 169

Teori Pembuatan Keputusan -- 171

Faktor yang Memengaruhi Pembuatan Keputusan -- 176

Mentakrif Kebijakan Publik -- 178

Sifat-sifat Kebijakan Publik -- 182

Pendekatan dalam Studi Kebijakan Publik -- 184

Bab 8. Demokrasi dan Demokratisasi -- 192

Demokrasi: Pandangan Beberapa Sarjana -- 194

Demokratisasi: Proses Menuju Demokrasi -- 204

Faktor Pendorong Demokratisasi -- 212

S
I
M
P
E
S
K
F
D
T

Bab 9. Konflik -- 223

Sumber Konflik -- 227

Tujuan dan Struktur Konflik -- 238

Mengatur dan Mengendalikan Konflik -- 241

Bab 10. Gender dan Feminisme -- 250

Seks dan Gender -- 252

Kendala dalam Meningkatkan Peran Perempuan -- 258

Feminisme -- 265

Daftar Pustaka -- 278

Tentang Penulis -- 294

- Bab 1 -

Pendahuluan

Sebagai sebuah ilmu, politik baru lahir pada Abad ke-19 dan berkembang pesat bersamaan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Sebagai sebuah praksis keseharian, politik telah dilakukan jauh ketika manusia membentuk "pemerintahannya sendiri", baik dalam bentuk kumpulan (*bands*), suku (*tribes*), *chiefdoms*, atau pun dalam bentuknya seperti sekarang ini, negara (*state*). Dan tujuan tersebut adalah *civic virtue* (kebaikan bersama).

Merujuk Plato dan Aristotle, memulai kebaikan bersama adalah tujuan masyarakat membentuk kumpulan, suku, dan bahkan negara. Bahkan di Abad Pertengahan, pemikir seperti Augustinus (354-430 M) mengenalkan doktrin tentang dua bilah pedang (pedang dunia dan pedang akhirat) yang juga mengarah pada kebaikan bersama. Lantas di tengah Abad Pertengahan, Thomas Aquinas (1225-1274 M) memberikan gambaran penting mengenai hukum sebagai roda penggerak kebaikan bersama dalam kehidupan kemasyarakatan. Penjelasan pelbagai hal tentang kebaikan bersama terus berlanjut di Abad Pencerahan oleh pemikir-pemikir lain, seperti Niccolo Machiavelli (1469-1527 M), Thomas Hobbes (1588-1679 M), John Locke (1632-1704 M), Montesquieu (1689-1755 M), hingga Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M). Pada Abad Modern, sedari Karl Marx hingga Gabriel Almond, Robert Dahl, serta Samuel P. Huntington pun meneroka tentang *civic virtue* dalam kehidupan kekinian. Mereka semua, tak dapat disangkal, berpendapat bahwa

tujuan dari politik adalah melembagakan kebaikan bersama melalui organisasi yang kita kenal dengan nama 'negara'.

Secara sederhana, semua ilmu sosial, termasuk ilmu politik di dalamnya, berupaya untuk mengerti, memahami, hingga meramalkan masa depan sebagai akibat dari perubahan sosial-politik, baik yang direncanakan maupun tidak. Perubahan selalu menantang pikiran rasional manusia untuk menanggapinya secara abduktif. Sebagai misal, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat memerlukan pengaturan kemasyarakatan lebih rapi, efektif, dan efisien; pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang memungkinkan terjadinya krisis legitimasi, partisipasi, dan integrasi, sehingga perlu kesaksamaan mendetail untuk mengantisipasi perubahan yang radikal; meruncingnya perbedaan kelas yang diakibatkan oleh terkapitalisasinya dunia oleh para pemodal dan *free-rider* yang tidak bertanggung jawab pun turut diperhitungkan secara abduktif, bahkan ekletik.

Ilmu politik, sebagai sebuah disiplin ilmu, pun dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti terpapar di atas. Untuk itu, ilmu politik membutuhkan tidak hanya satu atau dua metode, satu atau dua konsep, serta teori untuk menjawab ke semua itu; tetapi, lebih luas dari itu. Karenanya, tidak mungkin membatasi politik hanya dalam konteks dirinya sendiri; politik niscaya bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain.

Merujuk Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (2009) misalnya, beliau menyatakan bahwa ilmu politik sangat berhubungan dengan ilmu-ilmu lain untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang landai ataupun ekstrim. Ilmu sejarah, sebagai contoh. Ilmu sejarah dalam konteks politik merupakan alat/pedoman/dasar untuk mempelajari data dan fakta masa lampau, yang merupakan tujuan utama dari ilmu sejarah, sebagai bahan pertimbangan prediksi/proyeksi untuk masa depan. Ahli ilmu politik akan memandang sejarah dari berbagai sisinya untuk bisa menemukan dan menyusun pola-pola perilaku politik yang terjadi serta memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang diharapkan berkembang dalam keadaan tertentu (Miriam Budiardjo 2009: 26).

Begitu pula dengan ilmu filsafat sebagai proses berpikir yang bertujuan mendapatkan hal-hal yang pokok berdasarkan pengalaman untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara, khususnya moral dan etika. Filsafat-politik juga membahas tentang manusia yang baik/buruk, tindakan atau perbuatan baik/buruk, tujuan negara, sistem pemerintahan yang baik, karakteristik pemimpin yang baik, dan sebagainya. Maka, dapat disimpulkan bahwa filsafat politik mengajarkan tujuan dan etika politik, masyarakat yang baik, dan nilai moral yang menyangkut kebaikan bersama.

Selanjutnya, menurut Miriam Budiardjo (2009: 29-30), ilmu politik juga tidak bisa dilepaskan dengan sosiologi. Sosiologi berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik yang memberikan analisis kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Sosiologi berupaya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan masyarakat, baik golongan maupun kelompok. Sosiologi membahas susunan dan stratifikasi sosial yang memengaruhi maupun dipengaruhi berbagai segi, seperti *policy decision*, legitimasi dan keabsahan politik (*political legitimacy*), sumber-sumber kewenangan politik (*sources of political authority*), pengendalian sosial (*social control*), dan perubahan sosial (*social change*). Sosiologi menganggap suatu negara sebagai asosiasi dalam masyarakat dan memperhatikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota asosiasi tersebut memengaruhi sifat dan kegiatan negara. Sosiologi juga memperhatikan pengaruh perkembangan, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Jadi, apabila terjadi hal-hal tersebut dalam masyarakat, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat akan menunjukkan perubahan-perubahan baik dalam bermasyarakat maupun dalam pola-pola kehidupan politik.

Ilmu politik dan sosiologi sama-sama mempelajari tentang negara dan masing-masing berpandangan bahwa negara ditempatkan sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara keduanya. Sebagai misal, ilmu politik menganggap

negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan sosiologi menempatkan negara sebagai lembaga pengendalian sosial yang menggambarkan masyarakat yang sederhana maupun kompleks, kecenderungan proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tertentu, baik formal maupun nonformal. Sosiologi juga menganggap negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat.

Ada kedekatan objek penelitian serta pengembangan teori antara antropologi dan sosiologi (Miriam Budiardjo 2009: 30-31). Konsentrasi antropologi pada manusia dan kebudayaan masyarakat daerah pedalaman (*inland-agrarian*), sedangkan sosiologi pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan perkotaan yang jauh lebih banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Kepada ilmu politik, antropologi memberikan penjelasan tentang pengertian, teori kedudukan, dan peranan satuan-satuan sosial-budaya yang lebih terperinci dan sederhana. Antropologi menunjukkan kerumitan dan kesukaran membina kehidupan bercorak nasional serta masyarakat tradisional.

Antropologi juga berpengaruh pada metodologi penelitian ilmu politik, salah satunya yang terkenal dan yang kini sering dipakai dalam penelitian ilmu politik, adalah metode pengamat (*participant-observer*). Metode penelitian tersebut memaksa para *scholars* ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Penelitian awal tentang “negara-negara baru” hanya berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro atau luas, seperti pemerintahan, karena dianggap masalah-masalah daerah dapat diatasi oleh perkembangan kehidupan tingkat nasional. Antropologi memberikan pembahasan tentang kebudayaan daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lain yang mempunyai daya tahan kuat dalam usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional. Antropologi juga membahas betapa situasi faktor-faktor sosio-budaya menjadi jauh lebih kuat dan tersadarkan dalam melakukan penentangan terhadap usaha-usaha *nation-building* terutama dalam konteks *ethno-nationalism*.

Selanjutnya ilmu ekonomi (Miriam Budiardjo 2009: 32-33); secara teoretik, ilmu politik adalah ilmu yang erat kaitannya dengan proses pembuatan keputusan (*decision making process*) untuk pencapaian tujuan. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan distribusi atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dalam konteks ini, distribusi adalah penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Selain itu, ilmu ekonomi menaruh perhatian pada masalah pemanfaatan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memuaskan kebutuhan manusia yang beranekaragam. Dalam literatur ilmu ekonomi, ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai bagaimana seharusnya manusia atau masyarakat menentukan pilihan, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas, dan mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan barang, serta mendistribusikannya untuk keperluan masyarakat pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Ilmu ekonomi mempersoalkan perilaku ekonomi individu dan masyarakat untuk mendapatkan jawaban-jawaban bagi masalah yang menyangkut hubungan antara kebutuhan manusia dan alat pemuasnya. Jadi, yang dijadikan objek studi ilmu ekonomi saat ini adalah kebutuhan kebendaan dan jasa pelayanan. Dalam konteks ini, ilmu politik di era globalisasi yang cenderung pada logika demokrasi politik, niscaya sisi ekonomi terkait dengan ekonomi pasar. Secara singkat, ekonomi pasar adalah suatu perekonomian yang seluruh aktivitasnya diatur oleh interaksi di antara penjual dan pembeli. Dengan cara melihat seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu Politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling memengaruhi, yang secara gamblang dapat dicermati dalam bentuk keputusan-keputusan atau aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem politik atau sistem ekonomi pemerintah.

Psikologi sosial pun demikian. Ilmu ini mempelajari manusia atau individu-individu di dalam masyarakat serta gejala yang ditimbulkan atau memengaruhi hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya mempelajari faktor-faktor apa yang bisa

mendorong manusia agar mau hidup dan bergabung di dalam suatu *group* atau kelompok/golongan tertentu. Sesuai namanya, psikologi sosial berasal dari sosiologi dan psikologi. Sosiologi, yang mempelajari segala kegiatan kehidupan atau gejala-gejala sosial dalam suatu masyarakat tertentu, bersatu dengan psikologi, ilmu yang memusatkan perhatian pada kehidupan di dalam diri orang per orang, bukan pada peristiwa. Hubungan antara psikologi sosial dengan ilmu politik dilihat dari analisis sosial politik secara makro yang diperkuat oleh analisis yang bersifat mikro/psikologi sosial. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari dua segi, *extern* (melihat gejala-gejala atau peristiwa serta lingkungan yang ada di dalam masyarakat) dan *intern* (mengamati lebih ke dalam dari setiap individu, seperti tingkat semangat dan emosi). Dengan bantuan psikologi sosial, ilmu politik dapat secara mendalam mempelajari makna dan peranan 'orang-orang kuat', 'orang-orang besar', kepemimpinan efektif yang menghasilkan keputusan-keputusan politik berupa kebijakan publik dalam ruang lingkup politik, serta nilai-nilai budaya yang telah bertahun-tahun diterima masyarakat hingga melahirkan tingkah laku politik yang relatif stabil.

Selain seperti yang telah dijelaskan secara sederhana di atas, masih banyak ilmu lain yang juga memengaruhi ilmu politik. Dalam bagian pembuka ini akan juga dibahas ilmu lain setelah memahami konsep-konsep dasar ilmu politik, landasan mempelajari ilmu politik, dan upaya memahami pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik.

Memahami Konsep Dasar Politik

Ketika ditanya, "Apa yang dimaksud atau apa yang diketahui tentang politik?" maka jawaban atas pertanyaan tersebut tidak sesederhana pertanyaan yang diajukan. Ada sangat banyak varian jawabannya. Tapi, yang paling mudah adalah dengan merujuk asal katanya, *polis*. Kata tersebut (*polis*) membawa kita bergerak ke masa lampau di zaman Yunani Kuno tempat di mana para pemikir besar awal filsafat politik berada.

Aristotle misalnya, memandang politik sebagai penetapan “kota terbaik,” dalam bahasa kata Yunani, *polis* berarti “negara-kota” yang kemudian melahirkan kata ‘politik’ di kemudian harinya. Politik, menurutnya, haruslah membahas bukan hanya ciri-ciri khas ‘kota terbaik’, tetapi juga menganalisis sifat umum kota dan sistem-sistem politik atau, yang kemudian, ia sebut dengan istilah *politeiai*. Aristotle memandang bahwa politik sangat perlu untuk membahas warga negara sebagai entitas dasar negara-kota, karena baik/buruk suatu *polis* akan sangat bergantung pada kesepakatan tertentu di dalam masyarakat itu sendiri (Kaplan 1960: 21). Tujuannya untuk menciptakan kesepakatan bersama dan kesatuan demi tercapainya tujuan *polis* yakni kebaikan bersama.

Merujuk Aristotle, setidaknya, kita mendapatkan beberapa hal penting untuk dapat mendefinisikan politik. Pertama, politik membahas tentang negara yang dalam konteks kelaluan yang kemudian kita kenal dengan nama *polis*. Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal suatu negara, yaitu bagaimana sistem dalam negara harus dibangun sehingga lahir yang kemudian disebut Aristotle sebagai ‘kota terbaik’, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga yang ada di lingkup negara. Berdasarkan perihal di atas, Saltou (1961: 1) menjelaskan bahwa:

... politik (atau ilmu politik) adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negara serta dengan negara-negara lain.

Sejalan dengan itu, Barents (1965: 23) menyatakan, “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara ... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya”.

Kedua, terkait dengan hal pertama, maka politik akan sangat bersinggungan dengan kekuasaan. Untuk mewujudkan kota atau negara terbaik seperti yang dicitakan oleh Aristotle, perlu kiranya kekuasaan dimiliki oleh pihak-pihak yang mengelola negara. Kekuasaan diperlukan agar sistem-sistem (khususnya sistem politik) yang

dibangun dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Karena itu, ada beberapa ilmuwan yang menerangkan bahwa ilmu politik sebagai studi yang memperelajari kekuasaan; diantaranya Laswell & Kaplan (1950: 23), "Politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan." Demikian pula dengan Deliar Noer (1965: 56):

Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.

Sementara itu, Fleictheim dalam bukunya yang bertajuk *Fundamentals of Political Science* (1952: 17) menuliskan, "Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara."

Ketiga, merujuk deskripsi Aristotile tentang *polis*, dapat disarikan bahwa politik juga membahas mengenai keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara. Entitas yang tentu saja diinginkan Aristotile adalah entitas yang memiliki keseragaman nilai dan tujuan sehingga penciptaan tujuan akan mudah untuk dilakukan. Hal ini, secara implisit, menjelaskan bahwa negara perlu melembagakan kebijakan publik. Pelembagaan kebijakan publik bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi sebagai upaya mengikat subjektivitas individu ke dalam subjektivitas kolektif agar tercipta norma-norma dan nilai-nilai yang relatif homogen. Karena itu pula Easton, dalam *The Political System* (1971: 128), mengatakan, "Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan publik."

Perbincangan mengenai kebijakan publik akan bersinggungan langsung dengan pembuatan keputusan (*decision-making process*), yaitu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam

negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang berkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan, biasanya para *decision-makers* akan melakukan beberapa rangkaian yang saling terikat, mulai dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah, menghitung kerugian dan keuntungan (*costs-and-benefits*) yang dapat tercipta dari alternatif-alternatif kebijakan yang telah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan itu sendiri (Leo Agustino, 2006).

Berdasarkan ilustrasi Aristotle, dapatlah dipahami mengapa Miriam Budiardjo (2009: 17) mengatakan bahwa definisi ilmu politik akan berkait dengan pembahasan: (i) negara, (ii) kekuasaan, (iii) pengambilan keputusan, (iv) kebijakan, dan (v) distribusi atau alokasi. Pembahasan mengenai negara, menurut Miriam Budiardjo, merupakan titik sentral ilmu politik, yang pusat perhatiannya terletak pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk-bentuk formalnya. Pembahasannya dapat berupa bagaimana lembaga-lembaga kenegaraan tersebut menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, bagaimana lembaga-lembaga tersebut berperan dan berfungsi, sejauh mana keterlibatan lembaga kenegaraan dalam kehidupan publik, dan seterusnya. Karena itulah, pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan institusional atau kelembagaan.

Kedua, kekuasaan. Pembahasan mengenai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Pendekatan ini menilai, semua kegiatan politik selalu bersinggungan dengan upaya-upaya untuk merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Oleh sebab itu, kajian ilmu politik juga berkaitan dengan gejala merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan oleh penguasa, klas buruh, rejim militer, klas menengah, kaum muda, dan seterusnya.

Ketiga, pengambilan keputusan, menumpukan pada pembahasan: bagaimana keputusan-keputusan strategis ditetapkan. Keputusan, secara sederhana, berarti membuat pilihan di antara beberapa alternatif pilihan yang ada; sedangkan pengambilan keputusan lebih menjurus pada proses yang dilakukan oleh sekelompok orang sampai pada

keputusan itu ditetapkan. Setiap pengambilan keputusan selalu memunculkan perselisihan ide, argumentasi, justifikasi, dan sebagainya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dinamika kelompok menjadi unit analisis penting untuk diperhatikan, selain juga sumber-sumber daya yang melekat pada kelompok atau diri individu dalam meyakinkan orang lain sehingga ide atau usulan alternatif putusan yang disampaikannya dipilih untuk ditetapkan. Pengambilan keputusan juga membicarakan perihal, "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana"

Keempat, *public policy* yaitu pembahasan mengenai upaya sekelompok orang dalam mencapai cita-cita bersama melalui keputusan yang diambil dengan cara-cara tertentu. Dalam arti kata lain, kebijakan publik lebih bersahabat dibandingkan dengan pengambilan keputusan. Ia tidak menyertakan konflik ide, tetapi justru menghadirkan kerja sama (usaha bersama) dan perencanaan bertingkat untuk menuju kebaikan bersama yang diasakan dalam bentuk kebijakan publik.

Dan terakhir, pembagian atau alokasi (*distribution or allocation*) yaitu pembahasan mengenai pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini politik dimengerti sebagai budaya politik yang harus dibagikan dan dialokasikan kepada publik agar mengikat benak dan perilaku berpolitik publik. Tujuannya adalah untuk stabilitas dan minimalisasi konflik, yang seringkali terjadi ketika kita hanya memahami politik sebagai upaya merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Maka, yang diteliti adalah kenapa distribusi dan alokasi tidak merata, atau mengapa distribusi dan alokasi nilai lebih bermanfaat pada publik tertentu dan tidak pada publik lain, dan seterusnya.

Namun, kita akan kesulitan jika politik hanya terkonsentrasi pada pembahasan negara atau persoalan kekuasaan saja. Dalam mendefinisikan politik pun, para ilmuwan mempunyai pendapat yang berbeda. Ramlan Surbakti, dalam *Memahami Ilmu Politik* (1992: 1-2) misalnya, menjelaskan bahwa konsepsional ilmu politik akan berkait pada lima hal penting, yakni (i) Politik akan bersinggungan dengan

usaha-usaha yang ditempuh publik untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama; (ii) Politik juga berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; lantas (iii) Politik pun bersinggungan dengan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat; (iv) Politik juga sebagai konflik untuk mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting; serta (v) Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pertama, politik bersinggungan dengan usaha-usaha yang ditempuh publik untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan klasik. Dalam konteks ini, ilmu politik biasanya menggunakan pendekatan filsafat untuk memahami dan mengerti bagaimana kebaikan bersama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat diperoleh. Dari situ lahir pertanyaan, kebaikan bersama seperti apa yang hendak dibangun dalam bernegara dan bermasyarakat serta apa itu berkeadilan, kesejahteraan, ataupun kebahagiaan sebagai misal. Pertanyaan lanjutannya adalah kebaikan bersama siapa yang ditetapkan oleh "bersama", apakah bersama mayoritas kecil yang duduk di elite pemerintahan, atau kebaikan bersama yang dirumuskan oleh pemegang senjata, atau kebaikan bersama yang dikonstruksi oleh kelompok pemilik modal. Untuk menemukan model-model penciptaan kebaikan bersama yang ideal, banyak pemikiran filsafat politik yang dapat dipelajari, seperti Plato, Aritotle, St. Augustinus, Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan lainnya.

Kedua, politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan institusional. Dalam pandangan pendekatan kelembagaan, politik dilihat sebagai hal yang berkaitan dengan: (i) struktur-struktur kenegaraan yang mempunyai fungsi dan tugasnya yang berbeda-beda; (ii) penggunaan kekuasaan untuk memonopoli penyelenggaraan negara dan pemerintahan tersebut; dan (iii) penggunaan paksaan fisik dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Ketiga, politik bersinggungan dengan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan kekuasaan berkait erat dengan konsep-konsep, seperti *influence* (pengaruh), yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela; *force* (tekanan), kekuasaan yang diperoleh melalui penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu; *persuasion* (persuasi), kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu; *manipulation* (manipulasi), penggunaan pengaruh sehingga orang yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan; *coercion* (koersi), peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi; *authority* (kewenangan), kekuasaan yang diabsahkan (Ramlan Surbakti 1992: 57). Dengan demikian berarti, ilmu politik mempelajari secara mendalam perjuangan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Dalam pendekatan ini dibahas bagaimana legitimasi dan otoritas menjadi bagian yang tak terlepas dari kekuasaan, bagaimana integrasi dan/atau disintegrasi sebagai konsekuensi yang harus diterima dari pelebagaan kekuasaan; terbangunnya konsensus dan/atau munculnya konflik sebagai manifestasi dari kekuasaan yang diimplementasikan, dan seterusnya.

Keempat, politik sebagai konflik untuk mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Pendekatan ini mengupas konflik sebagai bahan kajian penting dalam ilmu politik. Konflik dilihat sebagai akibat dari proses integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas atau tidak terselesaikan, atau dalam bahasa lain, konflik dapat dianggap sebagai sebuah patologi sosial akibat kegagalan sebuah proses integrasi di dalam suatu masyarakat. Dan, yang perlu

dipastikan, ialah konflik dapat diartikan sebagai interaksi antara paling tidak dua individu atau kelompok yang memiliki tujuan berbeda, yang secara umum perbedaan tersebut merupakan ultimasi dari perbedaan pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Kelima, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik; atau disebut oleh Ramlan Surbakti (1992: 2-7) sebagai fungsionalisme. Fungsionalisme memandang bahwa politik sebagai kegiatan formulasi dan implementasi kebijakan publik, sehingga pemisahan antara politik dan administrasi publik seperti yang diutarakan oleh Henry, dalam bukunya *Public Administration and Public Affairs* (1980), tidak lagi menjadi ketetapan yang pasti. Di sini, politik dan kebijakan akan banyak bersinggungan.

Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan formulasi dan implementasi kebijakan diutarakan juga oleh Andrain dalam *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (1992). Dalam buku tersebut dijelaskan dan ditekankan bahwa politik merupakan serangkaian kegiatan yang menyertakan interaksi antara keyakinan (budaya, religius, dan lainnya), struktur, individu, serta kebijakan itu sendiri. Tujuannya untuk mencapai kepentingan umum yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mayoritas publik, dan berujung pada perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Tetapi, sebelum kebijakan itu menjadi ketetapan politik yang dilembarkan dalam lembaran negara, ada banyak persoalan politik mulai dari pertentangan kepentingan-kepentingan elite dalam proses formulasi kebijakan hingga proses pengambilan keputusan yang tidak dilakukan secara terbuka melainkan dilakukan dalam 'ruang-ruang yang kadang tertutup'. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik merupakan hasil akhir dari ketetapan-ketetapan politik yang harus diperjuangkan baik oleh kelompok, golongan, maupun partai politik tertentu.

Alasan Mempelajari Ilmu Politik

Bila merujuk pada fenomena politik yang terjadi belakangan ini maka ilmu politik menjadi penting untuk dipelajari. Setidaknya, ada tiga alasan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, pertimbangan ilmiah

(*scientific reasons*). Ilmu politik menambah pengetahuan yang lebih mendalam terkait proses, perkembangan, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi publik yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan publik pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, ilmu politik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatiannya tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang memengaruhi atau menentukan konten kehidupan manusia untuk pencapaian kebaikan bersama. Sebagai misal, pengaruh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah terhadap politik baik dalam pengertian negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, atau pun distribusi dan alokasi, atau pengaruh militerisme dan bubarnya parlemen terhadap perpolitikan suatu negara. Jika ilmu politik dipandang sebagai variabel independen, maka, sebaliknya, perhatian kita beralih pada dampak ilmu politik pada sistem politik dan lingkungannya. Sebagai contoh, pengaruh ilmu politik dalam dukungannya terhadap sistem politik atau sistem kepartaian yang tengah berwujud di masa datang, dampak kepolitikan suatu negara terhadap kesejahteraan sosial warga, dan sebagainya.

Kedua, ilmu politik dipelajari atas dasar pertimbangan profesional (*professional reasons*). Price (1965: 122-135) memberikan penjelasan mengenai pemisahan antara *scientific-estate* yang hanya dipakai untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan *professional-estate* (atau *professional reasons*) yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis. Dalam bahasa sederhana, ilmu politik dapat digunakan sebagai alat menerapkan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah sehari-hari. Di sini, kita tidak akan mempersoalkan apakah ilmuwan politik akan menambah pengetahuannya atas fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang tengah dihadapinya, tetapi lebih jauh dari itu. Apabila ilmuwan politik mengetahui sesuatu tentang faktor yang membantu terbentuknya kebaikan bersama, maka ia harus

mengerjakan sesuatu yang berguna, sehingga individu, kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai kebaikan bersama itu, atau, lebih jauh, ia harus bertindak untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi oleh publik. Pendapat semacam itu menunjukkan bahwa ilmu politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kebaikan bersama, artinya tidak hanya dipelajari untuk pertimbangan ilmiah semata. Konsekuensi dari posisi tersebut, misalnya, akan membawa Anda yang ingin mencegah monopoli di bidang politik, maka Anda harus melakukan sesuatu, tidak hanya mewacanakan dalam kajian ilmiah.

Ketiga, ilmu politik baik untuk dipelajari atas dasar pertimbangan politis (*political reasons*). Ilmu politik dipelajari pada dasarnya agar setiap hal-ihwal yang menyangkut “kebaikan bersama” dapat tepat guna mencapai tujuan yang dirasakan bersama. Pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar dengan perangkat politis yang dimilikinya. Dalam hubungan pertimbangan politik ini, perlu dibedakan antara *political will* dan *political consensus*. *Political will* pada dasarnya berhubungan dengan keinginan penguasa/elite untuk menyelesaikan pelbagai persoalan dengan konsekuensi ketidakpopuleran. Manakala *political consensus* berhubungan dengan kesepakatan bersama para elite politik, baik yang terbuka ataupun yang tidak, yang berguna bagi publik ataupun sebaliknya, yang tertulis maupun tidak, dalam rangka menghadirkan kepentingan bagi para pembuat keputusan. Karena itu, yang perlu diperhatikan dalam konteks politik di sini justru *political consensus*, yang harapannya pertimbangan politik yang positif muncul ke permukaan guna pembangunan dan pemberdayaan politik semua elemen.

Pendekatan dalam Ilmu Politik

Analisis politik merupakan sebuah instrumen untuk memahami realitas dan fenomena politik yang *intangible*. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan keseharian kita dipenuhi perihal politik yang tak kasat dan seringkali menipu mata telanjang. Para ilmuwan politik

berusaha keras menemukan unsur-unsur terdalam melalui pendekatan-pendekatan analisis politik untuk membantu kaum awam memahami realitas politik yang sejati dengan sederhana. Ada banyak kasus pribadi (privat) kemudian menjadi persoalan publik yang muncul dalam kancah politik, atau menyangkut distribusi yang timpang akibat pemilihan umum, atau keheranan kita manakala ternyata ada tingkat bunga dari kekuasaan di negara-negara yang berejim totaliter dan otoriter.

Salah seorang ilmuwan yang mendalami secara serius pendekatan-pendekatan dalam analisis politik ialah David E. Apter. Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisa Politik* (1996), Apter menjelaskan enam tradisi atau pendekatan dalam analisis politik, yaitu: (i) pendekatan filsafat politik, (ii) pendekatan kelembagaan (*institutionalism*), (iii) pendekatan tingkah laku atau perilaku (*behavioralism*), (iv) pendekatan kemajemukan (*pluralism*), (v) pendekatan struktural (*structuralism*), dan (vi) pendekatan perkembangan (*developmentalism*). Dan subbab ini menjelaskan pendekatan yang dikembangkan olehnya.

Pertama, Pendekatan Filsafat Politik. Pendekatan ini mengkaji nalar yang diterapkan pada masalah-masalah manusia, hal yang telah lama menjadi perhatian utama ilmu politik, atau lebih tepatnya, ilmu mengenai dasar-dasar politik. Perhatian filsafat politik terletak pada sasaran, tujuan moral, dan konsepsi sejati serta tak lekang oleh waktu. Beberapa kajian yang selalu saja dibahas dalam filsafat politik misalnya, kekuasaan, hukum, hak alamiah manusia, agama, kontrak sosial, utopianisme dan anti-utopianis, sindikalisme, serta anarkisme.

Kedua, Pendekatan Kelembagaan. Tak dapat dielak bahwa lembaga pemerintah mampu mewujudkan tujuan filosofis ke dalam praktik-empiris. Dengan demikian, lembaga negara mampu menertibkan kehidupan sosial dengan cara-cara politik, maka mereka mampu memengaruhi sifat dan tujuan politik yang ditetapkan secara filosofis. Jika terjadi penyimpangan pada penetapan yang bersifat filosofis, mulai tercerabut dari keadaan asalnya, hal itu karena praktik-praktik miring yang dilakukan dalam kelembagaan. Dan perlu diingat bahwa lembaga tidak dengan sendirinya ada. Ia ada dan terdiri dari orang-orang yang bertindak berdasar penafsiran mereka masing-masing

dipengaruhi tingkat pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, pengkaderan, dan sebagainya yang kesemuanya terbentuk saat berada di lembaga-lembaga pemerintah sebagai tempat berkuasa. Sebagai ilustrasi, lembaga-lembaga demokratis sulit muncul dalam masyarakat industri modern, yang keyakinan mengenai tindakan politik rasional berdasarkan kewajaran akal sehat diubah menjadi suatu etika paranoia kebencian atau ketakutan massal pada yang lain (*xenophobia*). Kasus seperti yang terjadi di Jerman pada Awal Abad ke-20 dapat dijadikan contoh dan rujukan. Di Jerman, ketika itu, orang menyerahkan konsensus politiknya pada pemerintah diktator, dan atas nama kebudayaan politik baru, mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar moral, bahkan keluar dari kewajaran akal sehat. Kejadian patologis akibat dari *political consensus* negatif menjadikan peradaban terkerdulkan. Genosida, kamar gas, *eugenic*, *holocaust*, dan istilah-istilah yang membangunkan bulu roma lain, merupakan kebudayaan baru yang terbentuk akibat laku lembaga yang berlebihan.

Ketiga, Pendekatan Tingkah laku atau Perilaku. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai manusia politik dalam satu satuan pengamatan, sebuah pendekatan yang mengalihkan perhatian dari kelembagaan kepada pengkajian mengenai tindak atau tingkah laku manusia serta dorongan tingkah laku tersebut. Kajian dalam pendekatan ini diantaranya, meliputi: (i) pendapat dan preferensi orang-orang mengenai hal-hal politik tertentu; (ii) penyebab manusia melakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang kemudian bisa berkembang dalam bentuk kolektif; (iii) waktu manusia-manusia mematuhi peraturan; (iv) penyesuaian diri manusia terhadap pandangan-pandangan yang bertolak belakang dengan pandangannya, serta cara mengubahnya; (v) kondisi dan situasi mereka berpartisipasi dalam politik; (vi) cara mereka melindungi kepentingan mereka. Tujuan pendekatan ini, tidak lain tidak bukan, memahami manusia sebagai pelaku tindakan politik.

Keempat, Pendekatan Pluralisme, yaitu menggabungkan fokus pendekatan kelembagaan tentang lembaga demokrasi dan lembaga pemerintahan perwakilan dengan pendekatan tingkah laku. Upaya

menjadi bagian dari suatu sistem kelembagaan per tiap individu dari latar belakang yang sangat berbeda atau relatif sama menjadi perhatian serius dalam pendekatan ini. Karena itu, pendekatan pluralisme berurusan dengan bentuk interaksi yang saling bersaing dan/atau saling bekerja sama serta menelaah akibat interaksi tersebut terhadap pengaturan sistem politik dalam masyarakat modern.

Kelima, Pendekatan Struktural, memusatkan perhatian pada hubungan individu dengan komunitas. Bidang kajiannya meliputi, pembagian kerja sosial dalam jaringan peran, kelas-kelas, dan cara-cara teratur untuk melakukan tindakan timbal-balik. Karenanya, hubungan-hubungan yang luas seperti halnya afiliasi kelas dipandang sebagai faktor-faktor penentu kekuasaan.

Terakhir, Pendekatan Perkembangan atau *Developmentalism*. Kalau pendekatan kelembagaan merupakan penerapan empiris dari filsafat politik menuju praktik yang nyata terorganisir; pendekatan pluralisme merupakan gabungan antara pendekatan kelembagaan dan pendekatan tingkah laku; maka *developmentalisme* merupakan pendekatan terapan baru dalam pengkajian politik yang menelaah pertumbuhan (dalam arti luas), industrialisasi, dan perubahan-perubahan sosial lain, serta dampaknya terhadap bentuk pemerintahan serta kebijakan yang dihasilkannya. Perubahan sosial akibat interaksi internasional, menurut pendekatan *developmentalisme*, akan menyertakan juga konflik-konflik kekuasaan yang terjadi antara masyarakat industri di dunia maju melawan industri-industri di dunia berkembang. Demikian juga dengan kepentingan-kepentingan dunia maju yang masuk sangat dominatif pada kebijakan-kebijakan strategis dalam negara-negara berkembang, dan telaah *problem* menganganya disparitas masyarakat miskin dengan masyarakat kaya di perkotaan yang berpengaruh terhadap perpolitikan dalam negeri.

Daftar Pustaka

- A. Sheperd. 1998. *Sustainable Rural Development*. London: MacMillan Press.
- Agus Dwiyanto, dkk. 2003a. *Reformasi: Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK.
- Agus Dwiyanto. 2003b. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK.
- Ahmad Suhelmi. 2000. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Darul Falah.
- Almond, G. 1974. *Comparative Politics Today*. Boston: Little Brown and Company.
- Almond, G. & Powell, B. 1978. *Comparative Politics*. Boston: LittleBrown.
- Almond, G. & Verba, S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Almond, G. & Verba, S. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokratisasi di Lima Negara*. Terjemahan. Jakarta: Bina Aksara.
- Andeson, B. 2003. *Imagined Communities*. Manila: Anvil.
- Anderson, J.E. 1984. *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Andrain, C. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terjemahan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Antoft, K. & Novack, J. 1998. *Grassroots Democracy: Local Government in the Maritimes*. Nova Scotia: Henson College, Dalhousie University.
- Apter, D. 1987. *Politik Modernisasi*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia.
- Apter, D. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.

- Axford, B, et al. 2002. *Politics: An Introduction*. London: Routledge.
- Azar, E. 1990. *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Aldershot: Dartmouth.
- Barent, J. 1965. *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*. Terjemahan. Jakarta: Pembangunan.
- Barker, E. 1942. *Reflections on Government*. Oxford: Clarendon Press.
- Barnes, S.H. & Kaase, M. 1979. *Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies*. Beverly Hills, CA; Sage.
- Barro, R.J. 1999. *Determinants of Economic Growth: A Cross-country Empirical Study*. Cambridge: MIT Press.
- Berelson, B.R., Lazarsfeld, P.F. & McPhee, W.N. 1954. *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign*. Chicago: Chicago University Press.
- Bintan R. Saragih. 1988. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Blains, A. 2000. *To Vote or Not To Vote: The Merits and Limits of Rational Choice Theory*. Pittsburg: Univeristy of Pittsburg.
- Blake, C.H. 1998. Economic Reform and Democratization in Argentina and Uruguay: The Tortoise and the Hare Revisited? *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 40(3): 1-26.
- Bob S. Handiwinata. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. London and New York: Routledge Curzon.
- Bobbio, N. 1987. *The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game*. New York: Polity.
- Bollen, K.A. 1980. Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy. *American Sociological Review* 45(3): 370-390.
- Brahmantio Isdijoso et al. 2001. *Prospek Penerapan Budget Tranparency dalam Pelaksanaan otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jakarta: Center for Economic and Social Studies.

- Brooker, P. 2000. *Non-democratic Regime: Theory, Government and Politic*. Houndmill: Macmillan.
- Buckhart, R.E. & Lewis-Back, M.S. 1994. Comparative Democracy: The Economic Development Thesis. *American Political Science Review* 88(4): 903-910.
- Budge, I. & Farlie, D. 1977. *Voting and Party Competition*. New York: Wiley.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Burns, D., Hambleton, & Hoggett. 1994. *The Politics of Decentralization: Revitalising Local Democracy*. London: MacMillan Press.
- Butler, D. & Stokes, D. 1969. *Political Change in Great Britain*. New York: St. Martin's.
- Cammack, P. 1997. *Capitalism and Democracy in the Third World: The Doctrine for Political Development*. London: Leicester University Press.
- Campbell, A., Converse, P., Miller, W. & Stokes, D. 1960. *The American Voters*. Chicago: University of Chicago.
- Campbell, A. & Kahn, R.L. 1952. *The People Elect a President*. Michigan: Institute for Social Research, University of Michigan.
- Chehabi, H.E. & Linz, J.J. 1998. A Theory of Sultanisme 1: A Type of Nondemocratic Rule. Dalam H.E. Chehabi & Juan J. Linz (Eds.). *Sultanistic Regimes*, 3-25. Baltimore: Johns Hopkins University.
- Cohen, J.L. & Arato, A. 1995. *Civil Society and Political Theory*. Massachussets: MIT Press.
- Collier, D. & Levitsky, S. 1997. Democracy With Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research. *World Politics* 49(3): 430-451.
- Dahrendorf, R. 1957. Towards a Theory of Social Conflict. *Journal of Conflict Resolution* 2(2).
- Dahl, R. 1957. The Concept of Power. *Journal Behavioral Science* II(1957): 201-215.
- Dahl, R.A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R.A. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.

- Dahl, R.A. 1999. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Dalton, R.J. 2006. *Citizenship Norms and Political Participation in America: The Good News is ... the Bad News is Wrong*. Washington D.C.: Center for the Study of Democracy and Civil Society.
- Dalton, R.J., Flanagan, S.C. & Beck, P.A. 1984. *Electoral Change in Advanced Industrial Democracies: Realignment of Dealignment?* Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Diamond, L. 1992. *The Democratic Revolution*. London: Freedom House.
- Diamond, L. 1994a. Introduction: Political Culture and Democracy. Dalam Larry Diamond (Ed.). *Political Culture and Democracy in Developing Countries*, 1-27. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Diamond, L. 1994b. Causes and Effects. Dalam Larry Diamond (Ed.). *Political Culture and Democracy in Developing Countries*, 229-249. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Diamond, L. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Terjemahan. Yogyakarta: IRE Press.
- Diamond, L. & Gunther, R. 2001. *Political Parties and Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Diamond, L., Linz, J.J. & Lipset, S.M. (Eds.). 1990. *Democracy in Developing Countries: Comparing Experiences With Democracy*. Boulder: Lynne Rienner.
- Diamond, L., Linz, J.J. & Lipset, S.M. 1995. Introduction: What Makes for Democracy? Dalam Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymour M. Lipset (Eds.). *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy*, 1-66. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Diamond, L., Linz, J.J. & Lipset, S.M. 1999. Introduction: Politics, Society, and Democracy in Latin America. Dalam Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymour M. Lipset (Eds.). *Democracy in Developing Countries: Latin America*, 1-70. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Diamond, L. & Plattner, M.F. (Eds.). 1997. *Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

- Diamond, L & Plattner, M.F. (Eds.). 2000. *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dougherty, J.E. & Pfaltzgraff, Jr., R. 1997. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Wesley Educational.
- Doorenspleet, R. 2006. *Democratic Transition: Exploring the Structural Sources of the Fourth Wave*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Downs, A. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row.
- Dunn, W. 1999. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Duverger, M. 1967. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen.
- Easton, D. 1971. *The Political System*. New York: Alfred A. Knopf.
- Edvardsson, B., Thomasson, B. & Ovretveit, J. 1994. *Quality of Service: Making it Really Work*. London: McGraw-Hill.
- Etzioni, A. 1967. Mixed-Scanning: A "Third" Approach to Decision-Making". *Public Administration Review* 27(5).
- Falleti, T.G. 2004. *A Sequential Theory of Decentralization and Its Effects on the Intergovernmental Balance of Power: Latin America Cases in Comparative Perspective*. Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Flechteim, O.K. 1952. *Fundamentals of Political Science*. New York: Ronald Press.
- Franz Magnis-Suseno. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Frederickson, G.H. 1984. *Administrasi Negara Baru*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Frederickson, G.H. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Frieden, J. 1991. *Debt, Development, Democracy: Modern Political Economy and Latin America, 1965—1985*. New Jersey: Princeton University Press.

- Friedrich, C.J. 1967. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham: Blaisdell.
- Fukuyama, F. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Gastil, R.D. 1993. The Competitive Survey of Freedom: Experiences and Suggestions. Dalam Alex Inkeles (Ed.). *On Measuring Democracies: Its Consequences and Concomitants*. New Brunswick: Transaction Publisher.
- Giddens, A. 1985. *Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press.
- Geddes, B. 1999. What Do We Know About Democratization After Twenty Years? *Annual Review of Political Science* 2: 115-144.
- Gerth, H.H. & Mills, C.W. 1958. *From Max Weber: Essay in Sociology*. New York: Galaxy Book.
- Gill, G. 2000. *The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society and Transition Process*. London: Macmillan Press.
- Glasgow, G. & Alvarez, R.M. 2005. Voting Behavior and the Electoral Context of Government Formation. *Electoral Studies* 24: 245-264.
- Goldberg, A. 1969. Social Determinants and Rationality as Bases of Party Identification. *American Political Science Review* 63(1): 5-25.
- Green, D.P. & Shapiro, I. 1994. *Pathologies of Rational Choice Theory*. New Haven: Yale University Press.
- Greenberg, E.S. & Mayer, T.F. (Eds.). 1990. *Changes in the State: Causes and Consequences*. Newbury Park, California: Sage Publications.
- Griffiths, M. & O'Callaghan, T. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge.
- Guinore, A. 2017. How Power Affects People: Activating, Wanting and Goal Seeking. *The Annual Review of Psychology*, DOI: 10.1146/annurev-psych-010416-044153.
- Gurr, T.R. 1993. *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflict*. Washington, DC: United State Institute of Peace.

- H. Quinney, Gauvin, L. & Wall, A.E. (Eds.). 1994. *Toward Active Living*. Windsor: Human Kinetics Publishers.
- Habermas, J. 2004. *Krisis Legitimasi*. Terjemahan. Yogyakarta: Qalam.
- Haggard, S. & Kaufman, R.R. 1995. *The Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Hagopian, M.N. 1994. *Regimes, Movements, and Ideologies*. New York: Longman.
- Harmon, M.J. 1964. *Political Thought from Plato to the Present*. New York: McGraw-Hill.
- Harish, J. 2014. Society and Social Power. *CADMUS* 2(3): 37-49.
- Harrison, L. & Huntington, S.P. 2000. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Harriss-White, B. 1996. *A Political Economy of Agricultural Markets in South India: Masters of the Countryside*. London: Sage
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PLOD UGM dan JIP FISIPOL UGM.
- Held, D. (Ed.). 1986. *New Form of Democracy*. London: SAGE.
- Held, D. 1987. *Models of democracy*. Stanford: Stanford University Press.
- Held, D. 1990. *Model of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Henry, N. 1980. *Public Administration and Public Affairs*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Hettne, B. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia.
- Humm, M. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Terjemahan. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Hunter, W. 1998. Negotiating Civil-Military Relations in Post-Authoritarian Argentina and Chile. *International Studies Quarterly* 42(2): 295-317.
- Huntington, S.P. 1956. *The Soldier and the State*. Harvard: Harvard University Press.
- Huntington, S.P. 1965. *Political Development and Political Decay*. *World Politics* XVII(3): 386-430.

- Huntington, S.P. 1975. *Political Order in Changing Society*. Bombay: Vakils, Feffer and Simon Private.
- Huntington, S.P. 1987. "The Goal of Development". Dalam Myron Weiner & Samuel Huntington (Eds.). *Understanding Political Development*. Boston: Little Brown and Co.
- Huntington, S.P. 1991a. "Democracy's Third Wave". *Journal of Democracy* 2(2): 12-34.
- Huntington, S.P. 1991b. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Huntington, S.P. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Grafiti.
- Huntington, S.P. 2001. *Benturan Antarperadaban: dan Masa depan Politik Dunia*. Terjemahan. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Huntington, S.P. & Nelson, J. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Terjemahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hyun-Jin Seo. 1999. "Changing Patterns of Electoral Participation in Korea: Decreasing Mobilized Participation and Democratization". *MA Thesis*. Purdue University.
- Ichlasul Amal. 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- IMD, Neterlands Institute for multiparty Democracy. 2006. *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik yang Demokratis*. Terjemahan. Jakarta: NIMD.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 1998. *Women in Parliament: Beyond Number*. Stockholm, Swedia: International IDEA.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 2000. *Democratization in Indonesia: An Assessment*. Stockholm: International IDEA.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 2001. *Democracy Assessment: the Basics of the International Idea Assessment Framework*. Stockholm: International IDEA.

- Juwono Sudarsono (Ed.). 1991. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Kaplan, J.D. 1960. *The Pocket of Aristotle*. New York: Pocket Books.
- Karl, T.L. 1990. "Dilemma of Democratization in Latin America". *Journal Comparative Politics* 23(1): 1-21.
- Keen, D. 2005. *Conflict and Collusion in Sierra Leone*. Oxford: James Currey Publishing.
- King, R. & Kendall, G. 2004. *The State, Democracy and Globalization*. New York: Palgrave Macmillan.
- Korten, D. & Sjahrir (Eds.). 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kryzanek, M.J. 1992. *Leaders, Leadership and U.S. Policy in Latin America*. Boulder, San Fransisco: Westview Press.
- Lake, D.A. & Rothchild, D. (Eds.). 1998. *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lam Wai-Man. 2003. "An Alternative Understanding of Political Participation: Challenging the Myth of Political Indifference in Hong Kong". *International Journal of Public Administration* 26(5): 473-496.
- Lane, J-K. & Ersson, S. 2003. *Democracy: A Comparative Approach*. London: Routledge.
- Lane, M. 2008. *Unfinished Nation: Indonesia Before and After Soeharto*. London: Verso.
- Laslett, P. 1960. *Two Treatises of Government: A Critical Edition With an Introduction and Apparatus Criticus*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Laswell, H.D. & Kaplan, A. 1950. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Lawson, S. 1991. *Some Conceptual and Empirical Issues in the Study of Regime Change*. Canberra: ANU Press.
- Lazarsfeld, P.F., Berelson, B. & Gaudet, H. 1968. *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press.

- Leo Agustino. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W.
- Lerner, D. 1964. *The Passing of Traditional Societies*. New York: Free Press.
- Lester, J.P. & Stewart, Jr. J. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont, CA.: Wadsworth.
- Lijphart, A. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Lindblom, C. 1977. *The Policy-Making Process*. New Haven: Yale University Press.
- Linz, J.J. & Stepan, A. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Linz, J.J. & Valenzuela, A. (Eds.). 1994. *The Failure of Presidential Democracy*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Lipset, S.M. 1959. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". *American Political Science Review* 53(1): 69-105.
- Lipset, S.M. 1960. *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: Doubleday & Co.
- Lipset, S.M. 1963. *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: Anchor Books.
- Lipset, S.M. 1981. *Political Man: Social Bases of Politics*. Expanded and Updated Edition. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lipset, S.M. 1994. "The Social Requisites of Democracy Revisited". *American Sociological Review* 59(1): 1-22.
- Luc Van De Goor et al. 1996. *Between Development and Destruction: An Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States*. Great Britain: The Netherlands Ministry of Foreign Affairs (DGIS)/The Netherlands Institute of International Relations.
- Maalouf, A. 2004. *In the Name of Identity*. Terjemahan. Yogyakarta: Resist Book.

- Macridis, R.C. 1983. *Contemporary Political Ideologies: Movement and Regimes*. Boston, Toronto: Little Brown and Company.
- Mann, M. 1986. "The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanism and Results. Dalam John A. Hall (Ed.)". *State in History*. Oxford: Blackwell.
- Marcuse, H. 1964. *One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. London: Routledge & Kegan Pul.
- Mazmanian, D.H., & Sabatier, P.A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- McClosky, H. 1968. Political Participation. Dalam David L Shills (Ed.). *International encyclopedia of social sciences*, 578-580. New York: MacMillan.
- McCoy, A.W. 1993. *An Anarchy of Families: State and Family in the Philippines*. Madison: University of Winsconsin Press.
- Miall, H., Ramsbotham, O. & Woodhouse, T. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Milbrath, L.W. 1965. *Political Participation: How and Why do People Get Involved in Politics?* Chicago: Rand McNally.
- Milbrath, L.W. & M. L. Goel. 1977. *Political Participation*. Chicago: Rand McNally College Publishing.
- Mill, J.S. 1960. *Representative Government in Three Essays: On Liberty, Representative Governement, the Subjective of Women*. Oxford: Oxford University Press.
- Miriam Budiarto (Ed.). 1981. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Miriam Budiarto. 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Miriam Budiarto. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mohtar Mas'ood & MacAndrews, C. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulgan, R. 1990. "Aristotle and the Value of Political Participation". *Political Theory* 18(2): 193-217.
- Munck, G.L. & Leff, C.S. 1997. Modes of Transition and Democratization: South America and East Europe in Comparative Perspective. *Comparative Politics* 29(3): 343-362.
- Norris, P. 2002. *Democracies Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norton, A. 1994. *International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of Advanced Democracies*. Cheltenham: Edward Elgar.
- O'Connor, J. 1973. *The Fiscal Crisis of the State*. New York: St. Martin's.
- O'Donnell, G. 1973. *Modernization and Bureaucracy Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute for International Studies, University of California.
- O'Donnell, G., Schmitter, P.C. & Whitehead, L. 1993a. *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- O'Donnell, G., Schmitter, P.C. & Whitehead, L. 1993b. *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Amerika Latin*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- O'Donnell, G., Schmitter, P.C. & Whitehead, L. 1993c. *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- O'Donnell, G. & Schmitter, P.C. 1993d. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Orwell, G. 1982. *Nineteen Eighty-Four*. Middlesex: Penguin Books.
- Panizza, F. 1997. "Late Institutionalisation and Early Modernisation: The Emergence of Uruguay's Liberal Democratic Political Order". *Journal of Latin American Studies* 29(3): 667-691.
- Phelps, E. 2005. Young Voters at the 2005 British General Election. *The Political Quarterly* 76(4): 482-487.

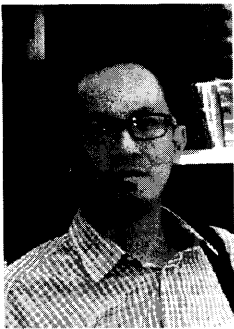
- Pierre, J. & Peters, G. 2000. *Governance, Politics and the State*. London: MacMillan Press.
- Pipit R. Kartawidjaja & Mulyana W. Kusuma. TT. *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*. Jakarta: KIPP Eropa, Inside, dan FNSt.
- Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J.A. & Limongi, F. 2000. *Democracy and Development: Political Institutions and Well-being in the World, 1950-1990*. New York: Cambridge University Press.
- Putnam, R.D. 1978. *The Comparative Study of Political Elite*. Englewood: Prentice-Hall.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Pye, L.W. 1963. *Communication and Political Development*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Pye, L.W. 1966. *Aspects of Political Development*. Boston: Little Brown.
- Pye, L.W & Verba, S. 1965. *Political Culture and Political Development*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Quintelier, E. 2007. "Difference in Political Participation Between Young and Old People". *Contemporary Politics* 13(2): 165-180.
- R. Dye, T. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Granesia.
- Remmer, K. 1991. *Military rule in Latin America*. Boulder: Westview.
- Rklund, L. 1999. *From Citizen Participation Towards Community Empowerment*. Tampere: Tampere University.
- Rokkan, S. & Lipset, S.M. 1967. *Cleavage Structures, Party Systems, and Voters Alignments: Cross National Perspectives*. New York: Free Press.
- Rueschemeyer, D., Stephens, E.H. & Stephens, J.D. 1992. *Capitalist Development and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Rush, M. & Althoff, P. 1971. *An Introduction to Political Sociology*. Melbourne: Thomas Nelson & Sons Ltd.
- Rustow, D. 1970. "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model". *Comparative Politics* 2(3): 337-363.

- Saltou, R.F. 1961. *An Introduction to Politics*. New York: Longman, Green & Co.
- Sanderson, S.K. 1991. *Macro Sociology*. London: HarperCollins Publisher Co.
- Sanderson, S.K. 2000. *Makro Sosiologi*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Sargen, L.T. 1987. *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Sartori, G. 1976. *Parties and Party Systems: A Framework of Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schmitter, P.C. & Karl, T.L. 1991. "What Democracy Is ... and Is Not?". *Journal of Democracy* 2(3): 75-88.
- Schumpeter, J.A. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Allen & Unwin.
- Schumpeter, J.A. 1950. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper Brother.
- Seongyi, Y. & Woo-Yung, C. 2010. "New Media and Political Socialization of Teenagers: The Case of the 2008 Candlelight Protest in Korea". *Social Science Computer Review* 29(2): 242-249.
- Share, D. 1987. "Transition to Democracy and Transition Through Transaction". *Journal Comparative Political Studies* 19(4): 525-548.
- Sharp, G. 1973. *The Politic of Nonviolent Action*. Boston: Extending Horizon Books Porter Sargent.
- Shaw, M. T.T. *Post-Military Society: Militarism, Demilitarization, and War at the End of the Twentieth Century*. London: Polity Press and Basil Blackwell.
- Silva, E. 1996. "From Dictatorship to Democracy: The Business-State Nexus in Chile's Economic Transformation, 1975-1994". *Comparative Politics* 28(3): 299-320.
- Sloam, J. 2007. Rebooting Democracy: Youth Participation in Politics in the UK. *Parliamentary Affairs* 60(4): 548-567.
- Soultau, R. 1961. *An Introduction to Politics*. London: Longmann, Green, and Co.

- Stepan, A. 1993. "Berbagai Jalur Menuju Demokratisasi: Sejumlah Pertimbangan Teoritis dan Komparatif. Dalam Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Schmitter & Lawrence Whitehead (Eds.)". *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, 107-143. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Stiefel, M. & Wolfe M. 1994. *A Voice for Excluded: Popular Participation in Development: Utopia or Necessity?* London: Zed Books.
- Stiglitz, J. 2003. *The Roaring Nineteen: A New History of the World's Most Prosperous Decade*. New York: W.W. Norton and Co.
- Sullivan, J.L., Piereson, J. & Marcus, G.E. 1982. *Political Tolerance and American Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Suwarsono & Alvin Y. So. 1994. *Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- The British Council dan New Economics Foundation. 2001. *Mewujudkan Partisipasi: 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*. Jakarta: The British Council.
- Tilly, C. 2007. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Toeti Heraty. 2000. *Calon Arang: Kisah Perempuan Korban Patriarki*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tommi A. Legowo. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah. Makalah Seminar Nasional, 'Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratisasi di Indonesia', Batam, 22-23 Maret.
- Tong, R.P. 1998. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komperhensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Terjemahan. Yogyakarta: JalaSutra
- Toni Adrianus, Efriza & Kemal Fasyah. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik: dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa.
- Uhlener, C.J. 1989. "Rational Turnout: the Neglected Role of Groups". *American Journal of Political Science* 33: 390-414.
- Uhlin, A. 2002. "Development and the External Dimension of Regime Transitions: Illustration from Indonesia. Dalam Ole Elgström & Goran Hyden (eds.)". *Development and Democracy: What Have We Learned and How?*, 173-190. London: Routledge.

- Uphoff, N. 1989. "Distinguishing Power, Authority & Legitimacy: Taking Max Weber at His Word by Using Resources-Exchange Analysis". *Journal Polity* 22(2): 295-322.
- van Meter, D. and C van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society* 6(4).
- Vanhanen, T. 1990. *The Process of Democratization: A Comparative Study of 147 States, 1980-88*. New York: Crane Russak.
- Vanhanen, T. 1997. *Prospect of Democracy: A Study of 172 Countries*. London: Routledge.
- Vanhanen, T. 2003. *Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries*. London: Routledge.
- Verba, S. & Nie, N.H. 1972. *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Verba, S., Nie, N.H. & Kim, J-O. 1978. *Participation and Political Equality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Verba, S., Scholzman, K.L. & Brady, H.E. 1995. "Beyond SES: A Resources Model of Political Participation". *American Political Science Review* 89(2): 271-294.
- Viotti, P.R. & Kauppi. 1987. *International Relations Theory*. New York: Mac Millan.
- Warren, M.E. 1999. "Introduction. Dalam Mark E. Warren (Ed.)". *Democracy and Trust*, 1-18. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, M. 1978. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Wright, J.G. 1977. "Contextual Models of Electoral Behavior: the Southern Wallace Vote". *American Political Science Review* 71(3):497-508.
- Wright, M.C. 1956. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- Yahya Muhaimin & MacAndrews, C. 1995. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: GMU Press.
- Zakaria, F. 2005. *Masa Depan Kebebasan: Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain*. Terjemahan. Jakarta: Ina Publikatama.

Tentang Penulis



Leo Agustino, lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan studi S1 pada 1999 dari Universitas Parahyangan (Unpar) dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dari; pada 2003, memperoleh Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI); dan *Doctor of Philosophy* (PhD) dalam bidang Ilmu Politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia, pada 2010. Sejak 2003 penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten.

Beberapa karya penulis yang telah terbit, diantaranya: *Pilkada: Dinamika Politik Lokal* (2009), *Pendemokrasian di Indonesia* (2013), *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (2014), *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Ed. Revisi 2016), *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus* (2017), dan beberapa lagi lainnya.

Buku ini disajikan dalam nuansa teoritik dan konseptual, artinya hampir dari keseluruhan isi dalam buku ini menyasar siapapun yang bermaksud mengenal politik sebagai ilmu, di situlah kekuatan buku ini. Manfaat akan dirasakan jika buku ini dapat pembaca jadikan pedoman dalam proses pengenalan ilmu politik. Adapun tema kunci yang dipaparkan dalam buku ini antara lain; Kekuasaan, Negara, Masyarakat Sipil, Sistem Perwakilan, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilu, Keputusan Politik dan Kebijakan Publik, Demokrasi dan Demokratisasi, Konflik, serta Gender dan Feminisme.

PENGANTAR
ILMU
POLITIK



INTRANS PUBLISHING
REBUT PERUBAHAN DENGAN MEMBACA

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang
Telp. (+62)341-573650
Fax. (+62)341-588010
Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pernaskahan)
intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)
www.intranspublishing.com

POLITIK

U-15+

ISBN: 978-602-6293-95-4



9 786026 129395 4

Harga P. Jawa Rp. 75.000